

Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa

Surya Wira¹, Arya Salman², Abimanyu Aziz³, Rofi Wahanisa⁴, Muhammad Adymas⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Reforma agraria merupakan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan lahan, khususnya di masyarakat pedesaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan mobilitas sosial yang lebih adil sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial penduduk pedesaan. Reforma agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi lahan, tetapi juga memperluas akses terhadap sumber daya agraria yang lebih luas seperti teknologi, modal, infrastruktur, dan pasar. Pendekatan holistik ini sangat penting untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dalam meningkatkan taraf hidup dan ketahanan ekonominya. Penelitian ini mengkaji dampak reforma agraria terhadap mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan dengan menganalisis tiga aspek utama: redistribusi aset, peningkatan kapasitas masyarakat, dan partisipasi aktif penduduk pedesaan dalam aktivitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reforma agraria dapat menjadi katalisator transformasi signifikan, yang mengarah pada peningkatan akses terhadap sumber daya, peluang pendapatan yang lebih besar, dan perubahan dalam struktur sosial.

Kata kunci: Reforma Agraria, Mobilitas Sosial, Masyarakat Pedesaan.

DOI: <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3376>

*Correspondence: SuryaWira

Email: suryawira@students.unnes.ac.id

Received: 11-10-2024

Accepted: 19-11-2024

Published: 03-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Agrarian reform is a policy designed to reduce inequality in land ownership and control, particularly in rural communities. Its primary goal is to foster more equitable social mobility while enhancing the economic and social welfare of rural populations. Agrarian reform goes beyond merely redistributing land; it also focuses on increasing access to broader agrarian resources such as technology, capital, infrastructure, and markets. This holistic approach is critical for empowering rural communities to improve their living standards and economic resilience. This research investigates the impact of agrarian reform on the social and economic mobility of rural communities by analyzing three key aspects: the redistribution of assets, the enhancement of community capacities, and the active participation of rural residents in economic activities. The results indicate that agrarian reform can serve as a catalyst for significant transformations, leading to better access to resources, increased income opportunities, and changes in social hierarchies.

Keywords: Agrarian Reform, Social Mobility, Rural Communities.

Pendahuluan

Reforma agraria telah menjadi salah satu agenda penting dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan yang telah mengakar di masyarakat, di mana sebagian besar lahan pertanian dikuasai oleh segelintir individu atau korporasi besar. Melalui redistribusi lahan yang lebih adil, reforma agraria bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat kecil, terutama petani, untuk mengolah lahan dan meningkatkan produktivitas mereka. Oleh karena itu, reforma agraria tidak hanya berfungsi sebagai program redistribusi lahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Reforma agraria dalam konteks ekonomi memiliki peran yang sangat signifikan. Ketika lahan didistribusikan secara merata, akses terhadap sumber daya pertanian akan terbuka lebih lebar bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Hal ini memberikan kesempatan bagi petani kecil untuk meningkatkan hasil pertanian mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup. Penelitian menunjukkan bahwa redistribusi lahan melalui reforma agraria dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas pertanian, yang menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal. Dengan kepemilikan lahan yang jelas dan terlindungi secara hukum, petani dapat berinvestasi lebih banyak dalam praktik pertanian yang berkelanjutan, sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat desa.

Dari sisi sosial, reforma agraria juga memiliki dampak yang penting, terutama terkait dengan mobilitas sosial. Akses yang lebih baik terhadap lahan dan sumber daya ekonomi memberikan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan status sosial dan ekonominya. Ketika masyarakat desa memiliki hak atas lahan mereka, hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan terciptanya akses yang lebih luas terhadap kesempatan ekonomi, diharapkan dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik yang sering kali muncul akibat ketidakadilan dalam kepemilikan lahan.

Konflik agraria merupakan salah satu isu krusial yang sering terjadi di Indonesia, di mana banyak masyarakat desa yang terpaksa berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah yang mereka kelola. Situasi ini dapat menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal dan pihak-pihak yang menguasai lahan secara ilegal atau tidak sah. Reforma agraria berpotensi mengurangi konflik ini dengan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam kepemilikan lahan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, reforma agraria dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan stabil.

Meskipun reforma agraria menjanjikan banyak keuntungan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini, termasuk ketidakpastian hukum, keterbatasan anggaran, dan resistensi dari pemilik lahan yang telah lama menikmati dominasi atas lahan mereka. Selain itu, terdapat pula kendala kultural yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang kepemilikan lahan dan struktur sosial yang ada di pedesaan.

Pemahaman yang kurang tentang pentingnya reforma agraria dan manfaatnya dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Tantangan lain yang dihadapi adalah birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Proses penguasaan lahan dan redistribusi seringkali terhambat oleh prosedur yang rumit dan memakan waktu, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program reforma agraria. Dalam beberapa kasus, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan reforma agraria juga muncul karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan ini. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan reforma agraria secara efektif, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif, yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Pentingnya pendidikan dan penyuluhan juga tidak dapat diabaikan dalam konteks reforma agraria. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka atas lahan, prosedur hukum, dan cara-cara untuk mengelola lahan secara produktif. Pendidikan dan penyuluhan yang baik akan membantu masyarakat memahami manfaat dari reforma agraria dan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam program-program yang ditawarkan. Dengan demikian, reforma agraria bukan hanya sekadar redistribusi lahan, tetapi juga proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Meskipun berbagai tantangan dan hambatan masih ada, reforma agraria tetap memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi semua pemangku kepentingan—baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta—untuk bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konteks lokal dan partisipasi aktif masyarakat, reforma agraria dapat mengubah wajah masyarakat desa menjadi lebih sejahtera dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, artikel ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana reforma agraria dapat berfungsi sebagai motor penggerak mobilitas sosial di pedesaan Indonesia, serta tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Diharapkan, analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya reforma agraria dalam menciptakan masyarakat desa yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini sepenuhnya dilakukan berdasarkan kajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian utama. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Reforma Agraria, serta Transformasi Mobilitas Sosial dalam perspektif ekonomi dan sosial masyarakat desa. Masalah-masalah yang diidentifikasi kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku atau dengan asas-asas hukum yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Reforma Agraria terhadap Peningkatan Akses Masyarakat Desa terhadap Sumber Daya Ekonomi

Reforma agraria memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi melalui distribusi tanah yang lebih merata kepada masyarakat desa, yang umumnya berpenghasilan rendah dan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya agraria. Dalam konteks ini, kebijakan reforma agraria yang berfokus pada redistribusi lahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepemilikan lahan yang dapat digunakan sebagai aset ekonomi produktif. Tanah yang dimiliki ini membuka peluang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha pertanian atau sektor agribisnis lainnya, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan memberikan kontribusi pada perekonomian pedesaan secara keseluruhan.

Secara ekonomi, kepemilikan lahan yang dihasilkan melalui reforma agraria dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dan perkotaan. Dalam banyak kasus, redistribusi lahan mendorong munculnya kegiatan ekonomi baru, seperti peningkatan produksi hasil pertanian, pembukaan usaha kecil berbasis lahan, serta perkembangan sektor jasa terkait agraria. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya membantu mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan tetapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap pengusaha besar atau pemilik modal yang sering kali mendominasi sektor agraria di daerah tersebut.

Selain itu, dalam perspektif sosial, kepemilikan lahan hasil reforma agraria mempengaruhi mobilitas sosial masyarakat desa. Ketika masyarakat memiliki lahan dan mampu mengelola aset tersebut dengan baik, hal ini dapat membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup serta memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Akibatnya, tercipta lapisan sosial baru di desa yang memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga mendorong mobilitas sosial yang lebih baik.

Namun, meskipun reforma agraria memberikan peluang besar bagi masyarakat desa, terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya, seperti keterbatasan dalam penyediaan akses modal bagi petani baru, minimnya pelatihan atau pendampingan teknis, serta kurangnya infrastruktur penunjang seperti irigasi dan akses pasar. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar tujuan reforma agraria dalam meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat desa dapat tercapai secara optimal.

Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa, Serta Dampaknya Terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi

Reforma agraria di Indonesia bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan lahan demi mencapai keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari aspek hukum hingga aspek sosial yang berpengaruh signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat di desa. Berikut ini merupakan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam melaksanakan pemerataan reforma agraria di pedesaan.

Tantangan Hukum dan Administratif

Tantangan utama dalam pelaksanaan reforma agraria di desa adalah aspek Hukum dan administratif yang rumit. Terdapat berbagai undang-undang yang mengatur tentang agraria, namun implementasinya sering kali tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, perbedaan kewenangan dalam pengelolaan lahan antara pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memperlambat proses redistribusi lahan. Selain itu, banyak lahan yang memiliki status hukum yang tidak jelas, seperti tanah adat atau tanah garapan, yang sering kali tidak tercatat secara formal di BPN, sehingga sulit untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat

Konflik Kepentingan antara Pemerintah, Korporasi, dan Masyarakat Lokal

Pelaksanaan reforma agraria juga menghadapi kendala dalam bentuk konflik kepentingan. Di banyak daerah, tanah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk reforma agraria sering kali telah dikuasai oleh perusahaan besar atau individu dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan antara korporasi dan masyarakat lokal, yang berdampak pada keterbatasan akses masyarakat desa terhadap lahan. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah sering kali memicu ketegangan sosial yang berkepanjangan. Contohnya, beberapa kasus sengketa lahan di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan bahwa masyarakat adat sering kali kehilangan hak atas tanah mereka yang digunakan untuk konsesi perkebunan sawit atau hutan tanaman industri.

Kurangnya Sumber Daya untuk Implementasi Program

Program reforma agraria membutuhkan dukungan sumber daya yang besar, baik secara finansial, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Di banyak desa, pemerintah daerah sering kali mengalami keterbatasan dana dan tenaga ahli untuk melakukan pengukuran dan pengelolaan tanah secara efektif. Akibatnya, proses redistribusi lahan menjadi lambat dan tidak efisien, yang pada akhirnya menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reforma agraria. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi petani penerima tanah juga menjadi kendala, karena mereka sering kali belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola lahan secara produktif.

Resistensi Sosial dan Budaya

Di beberapa daerah, pelaksanaan reforma agraria menghadapi resistensi dari masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi terkait hak atas tanah dan cara pengelolaan lahan. Masyarakat adat, misalnya, memiliki ikatan emosional dan budaya yang kuat terhadap tanah leluhur mereka, sehingga mereka mungkin merasa terganggu dengan adanya intervensi dari pemerintah yang mengubah sistem penguasaan lahan tersebut. Selain itu, masyarakat desa yang sudah terbiasa dengan pola hidup tradisional terkadang kurang memiliki motivasi untuk mengubah cara pengelolaan lahan mereka, terutama jika perubahan tersebut membutuhkan waktu dan tenaga tambahan.

Kemudian dalam pelaksanaan reforma agraria memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial masyarakat desa. Pertama, distribusi tanah yang lebih merata dapat mengurangi ketimpangan sosial di desa, karena masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki lahan kini memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui

kegiatan pertanian. Namun, dalam beberapa kasus, redistribusi lahan dapat memicu konflik sosial, terutama jika ada kecemburuan antara kelompok masyarakat yang menerima lahan dan yang tidak mendapatkan lahan. Lalu kedua, reforma agraria dapat memperkuat solidaritas komunitas jika dijalankan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, tanpa adanya komunikasi yang baik, reforma agraria justru dapat memecah belah masyarakat, terutama jika proses distribusi lahan dianggap tidak adil oleh sebagian pihak.

Dari segi ekonomi, reforma agraria dapat meningkatkan produksi pertanian di desa, yang berpotensi memperkuat perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya luar. Dengan akses tanah yang lebih merata, masyarakat desa memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui hasil pertanian. Selain itu, reforma agraria dapat meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi hasil pertanian, sehingga membuka kesempatan usaha baru di sektor-sektor pendukung, seperti pengolahan hasil pertanian dan perdagangan. Namun, kendala dalam mendapatkan modal dan akses teknologi sering kali menjadi penghambat. Banyak petani yang menerima lahan dari program reforma agraria mengalami kesulitan untuk mengembangkan lahan mereka karena kurangnya modal dan minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern. Akibatnya, dampak ekonomi yang diharapkan dari reforma agraria sering kali tidak bisa tercapai secara optimal, dan masyarakat tetap terjebak dalam siklus kemiskinan.

Efektivitas Reforma Agraria dalam Meningkatkan Akses Masyarakat Desa terhadap Sumber Daya Ekonomi

Reforma agraria di Indonesia merupakan inisiatif strategis yang terdiri dari dua aspek utama: Asset Reform dan Access Reform. Inisiatif ini dirancang untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan tujuan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi desa, reforma agraria diharapkan dapat mengatasi ketimpangan yang selama ini mengakar di masyarakat.

Asset Reform

Asset Reform berfokus pada redistribusi dan penguatan hak milik atas tanah bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Ini sangat penting karena kepemilikan tanah di Indonesia terkait dengan kekuatan sosial, identitas, dan akses ke sumber daya. Tujuan dari proses redistribusi tanah adalah untuk memberikan akses lahan kepada individu atau kelompok yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi. Hal ini penting karena akses terhadap tanah seringkali merupakan komponen penting dalam meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki lahan yang dapat diolah, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan hasil pertanian dan diversifikasi sumber pendapatan mereka, misalnya melalui usaha peternakan dan usaha mikro lainnya. Selain itu, penerbitan sertifikat hak milik memberikan keamanan hukum yang penting. Dengan menjadikan tanah sebagai jaminan untuk investasi dalam usaha pertanian atau usaha kecil dan menengah, kepemilikan yang jelas memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan permodalan.

Studi menunjukkan bahwa kepemilikan tanah yang jelas dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan

adanya kepastian hukum, masyarakat cenderung lebih berani melakukan investasi jangka panjang dan mengembangkan metode pertanian yang inovatif. Peningkatan kepemilikan tanah juga dapat mengurangi kemiskinan dan keamanan pangan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, Reformasi Asset tidak hanya mengubah sifat kepemilikan tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Access Reform

Selain itu, Access Reform melengkapi Asset Reform dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan layanan pendukung yang diperlukan. Strategi ini berfokus pada penyediaan infrastruktur, permodalan, teknologi, dan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kapasitas produktif masyarakat desa.

Dalam konteks ini, memberikan akses modal menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Reformasi akses memungkinkan pemilik tanah dengan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah di desa, yang seringkali terhambat oleh sumber pendanaan yang terbatas. Selain itu, untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, langkah strategis yang diperlukan adalah membangun infrastruktur seperti pasar, gudang, dan jalan. Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi biaya transportasi, meningkatkan efektivitas distribusi produk, dan meningkatkan pasar hasil pertanian.

Selain itu, upaya tersebut didukung oleh pendampingan dan pelatihan keterampilan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola usaha, mereka dapat menangani tantangan pasar dengan lebih baik dan meningkatkan daya saing produk lokal. Perkenalan dengan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan manajemen usaha yang lebih baik adalah bagian lain dari pelatihan. Oleh karena itu, reformasi akses memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Sinergi keduanya

Untuk mencapai hasil terbaik, kedua komponen reforma agraria ini harus dilakukan secara bersamaan. Asset Reform tanpa Access Reform akan menghalangi pemilik tanah untuk memanfaatkan aset mereka sepenuhnya. Sebaliknya, jika dilaksanakan tanpa kepemilikan aset yang jelas, reformasi akses tidak akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tidak dapat diremehkan betapa pentingnya kedua komponen ini bekerja sama. Akses terhadap sumber daya dan modal yang diberikan oleh Access Reform tidak akan memiliki dampak yang diharapkan jika tidak ada kepastian hukum yang dihasilkan oleh reformasi aset. Sebaliknya, komunitas yang memiliki kepemilikan tanah yang jelas tetapi tidak didukung oleh infrastruktur dan akses modal akan kesulitan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kedua komponen ini bekerja sama dan berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat penting.

Reforma agraria di Indonesia dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui

sinergi antara reforma aset dan akses. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi sumber daya tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Reforma agraria di Indonesia memiliki peran krusial dalam memperkuat kesejahteraan ekonomi dan mobilitas sosial masyarakat desa melalui distribusi lahan yang lebih merata. Redistribusi tanah bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat desa terhadap sumber daya agraria sebagai aset produktif, membuka peluang bagi peningkatan kegiatan ekonomi lokal seperti pertanian dan agribisnis. Dampak reforma agraria ini tidak hanya mengurangi ketimpangan ekonomi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, tetapi juga membantu membangun lapisan sosial baru yang memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Namun, pelaksanaan reforma agraria dihadapkan pada tantangan hukum, administrasi, konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan resistensi sosial-budaya. Persoalan tumpang tindih regulasi, konflik antara masyarakat lokal dengan korporasi, dan minimnya dukungan infrastruktur serta pelatihan menjadi kendala dalam mencapai tujuan reforma agraria. Tantangan-tantangan ini sering kali memperlambat proses redistribusi lahan dan menghambat akses masyarakat terhadap modal serta teknologi.

Efektivitas reforma agraria dapat diwujudkan melalui sinergi antara Asset Reform dan Access Reform. Asset Reform berfokus pada penguatan kepemilikan tanah untuk masyarakat, sementara Access Reform melengkapi dengan penyediaan akses ke modal, infrastruktur, pelatihan, dan teknologi. Kolaborasi kedua aspek ini sangat diperlukan agar masyarakat desa dapat memaksimalkan potensi lahan secara berkelanjutan.

Referensi

- Arisaputra, M. I. (2015). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Bambang Suharto. (2019). Keterbatasan Sumber Daya dalam Reforma Agraria di Indonesia. *Ekonomi Desa*, 7(2), 38.
- Budi Setiawan. (2020). Implementasi Reforma Agraria di Indonesia: Tantangan dan Kendala, *Jurnal Agraria*, 15(3), 25-30.
- Erwin Susilo. (2018). Konflik Agraria di Sumatera: Antara Perusahaan dan Masyarakat Lokal. *Jurnal Sosial dan Politik*, 18(4), 102.
- Firdaus, M., et al. (2023). Rural Development and Social Mobility: Evidence from Agrarian Reform Villages in Indonesia. *International Journal of Rural Studies*, 9(4), 104-119.

- Harsono, T., & Putri, S. (2020). Bureaucratic Challenges in Agrarian Reform Implementation in Indonesia. *Policy Studies Review*, 27(1), 67-81.
- Heru Purnomo. (2020). *Masyarakat dan Reforma Agraria*. Jakarta: Nusantara Press, 83.
- Hidayat, A. (2019). Reforma Agraria sebagai Sarana Mobilitas Sosial di Desa. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 12(3), 234-248.
- Indra Fauzan. (2019). Efek Ekonomi Reforma Agraria di Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Pedesaan*, 15(2), 44.
- Juniarto, M. R., & Pandamdari, E. (2024). IMPLEMENTASI PENATAAN ASET DAN PENATAAN AKSES DI KELURAHAN TONGOLE KOTA TERNATE: Asset Reform and Access Reform Implementation on Tongole Sub-district Ternate City. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 463-474.
- Kusumawati, A., & Setyowati, R. (2022). Land Tenure and Agrarian Reform Policy in Indonesia. *Journal of Land Policy*, 14(2), 32-48.
- Nugroho, D., et al. (2023). Challenges and Prospects of Agrarian Reform in Indonesia: Economic and Social Implications. *Indonesian Journal of Economic Policy*, 18(2), 95-110.
- Putri Andriana.(2019). *Reforma Agraria dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Gramedia, 73.
- Rahardjo, S., & Nugraha, Y. (2020). Conflict Resolution in Agrarian Reform: A Case Study of Rural Land Ownership. *Agrarian and Environmental Studies Journal*, 12(1), 78-92.
- Rahayu, I. & Setiawan, B. (2020). Redistribusi Lahan dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan dalam Perspektif Reforma Agraria. *Jurnal Agraria*, 5(2), 101-119.
- Ratna Dewi. (2020). Modal dan Teknologi sebagai Tantangan Reforma Agraria. *Jurnal. Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, 12(1), 98.
- Rizki Saputra. (2019). Reforma Agraria dan Dampak Sosial di Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan**, 10(3), 56.
- Santosa, D. (2021). Pengaruh Kebijakan Reforma Agraria terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 45-62.
- Siti Nurhayati. (2021). *Sengketa Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 45-46.
- Suryahadi, A., et al. (2021). Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 25-55.
- Taufik Rahman. (2020). *Tanah dan Masyarakat Adat*. Bandung: Media Agraris, 122.

-
- Wibowo, F. S., Wibowo, G. D. H., & Putro, W. D. (2022). Implementasi Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam Terhadap Access Reform. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(9), 2027-2041.
- Wibowo, T. (2022). Kendala Implementasi Reforma Agraria dan Solusinya dalam Perspektif Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Kebijakan Agraria*, 10(4), 89-102.
- Wijaya, R., & Abdullah, Z. (2023). Social Transformation in Rural Indonesia: An Analysis of Agrarian Reform Impacts. *Journal of Social Dynamics*, 5(3), 58-75.